BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menunjukan indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 38,03%. Angka tersebut meningkat dibanding hasil survey OJK 2016 yaitu indeks literasi keuangan 29,7%, namun literasi keuangan Indonesia masih kecil dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Singapura (96%), Malaysia (81%), dan Thailand (78%) (ojk.co.id, 2019). Dalam mempercepat literasi keuangan di Indonesia, Presiden RI memiliki cara yang sudah dicanangkan, salah satunya adalah peningkatan layanan jasa keuangan terutama bagi UKM.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolahan keuangan (ojk.co.id, 2019). Literasi keuangan akan membantu bagi pelaku usaha terkait pengelolahan usaha dimulai dari anggaran, perencanaan simpan dana usaha, serta pengetahuan dasar atas keuangan untuk mencapai tujuan keuangan usaha. Literasi keuangan sangat penting bagi para pelaku UKM karena dengan adanya literasi keuangan dapat memberdayakan UKM tentang sumber-sumber pendanaan dan keterampilan yang akan didapatkan UKM untuk menimbang pilihan mereka dengan mencari pembiayaan untuk mengoptimalkan struktur keuangannya (Soetiono dan Setiawan, 2018:154, Anggraeni, 2015).

Hasil penelitian Dewi, dkk (2017) menyatakan bahwa keberhasilan seorang pemilik usaha tergantung pada pendidikan dan kemampuan belanjanya dalam lingkungan usaha, seorang pemilik usaha dituntut untuk menguasai aneka keterampilan teknis kemampuan yang tinggi untuk belajar dan beradaptasi dengan lingkungannya. Menurut Julia (2016:2) semakin tinggi wawasan yang dimiliki seseorang yang didapat dari pendidikan yang telah ditempuh, maka hal tersebut dapat mendorong seseorang untuk memikirkan keberlangsungan usahanya, salah satunya ialah dengan cara melakukan pengelolahan keuangan yang baik. Hal ini disebabkan karena pengalaman pendidikan formal di jenjang lebih tinggi dirasa lebih banyak dan luas, dibandingkan dengan yang pendidikan formalnya rendah dan kurang pengalaman pendidikan.

Dalam menjalankan sebuah usaha juga tidak terlepas dari sebuah perencanaan, salah satunya adalah perencanaan keuangan suatu usaha atau bisnis. Perencanaan keuangan merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang keuangan dengan menempatkan berbagai atribut keuangan secara sistematis dan terkonsep dengan menempatkan atribut keuangan tersebut secara jangka pendek dan jangka panjang (Bonang, 2019:160). Perencanan keuangan dapat terbentuk mulai dari pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, perencanaan pendidikan anak, pensiun dan jaminan hari tua (Wardhani, 2019:13). Untuk menyusun sebuah perencanaan keuangan, pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) seharusnya mengerti serta memahami bagaimana menyusun perencanaan keuangan yang baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 bantuan pemerintah merupakan bantuan yang memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh

pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah. Pemerintah resmi menggulirkan program bantuan untuk pelaku UKM di Indonesia, bantuan tersebut yaitu penjaminan modal kerja, pajak digratiskan atau ditanggung Pemerintah, subsidi listrik, program UKM Go Digital, dan yang terbaru adalah BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) yang diberikan untuk pelaku UKM (setkab.co.id, 2020). Tujuan dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah yaitu untuk memperkuat serta memperkokoh ketahanan pelaku UKM dalam menghadapi pademi.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian-penelitian sebelumya. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti, dkk tahun 2017 yang berjudul tingkat pendidikan, literasi keuangan, dan perencanaan keuangan terhadap perilaku keuangan UMKM Surakarta. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wardhani tahun 2019 yang berjudul pengaruh tingkat pendidikan, literasi keuangan, dan perencanan keuangan terhadap perilaku keuangan UMKM unggulan di Kabupaten Lumajang. Kedua penelitian tersebut memiliki variabel yang sama dengan objek yang berbeda. Dari dua penelitian tersebut peneliti tertarik meneliti judul tersebut dengan tambahan variabel X yaitu bantuan pemerintah.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Langsa (Kota Langsa dalam angka, 2020) menyatakan bahwa sektor perdagangan meningkat secara signifikan di Kota Langsa. Toko-toko dan restoran yang bermunculan menjadikannya ideal sebagai kota persinggahan dari Kabupaten-kabupaten tetangga. Hal ini dapat dilihat dari penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) yang terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah surat izin

usaha yang diterbitkan pemerintah Kota Langsa pada tahun 2019 adalah sebanyak 359 surat. Surat izin terbanyak diterbitkan pada kecamatan Langsa Kota yaitu sebanyak 159 surat.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Nuzaryanti, SE selaku Kepala Bidang Koperasi dan UKM di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindakop), dan UKM Kota Langsa menyatakan bahwa selama pandemi pelaku UKM di Kota Langsa mengalami penurunan penjualan dan banyak dari mereka yang menutup usahanya, akibatnya penghasilan yang mereka dapatkan kurang dari 60% dibandingkan penghasilan sebelum terjadinya pandemi. Upaya yang dilakukan pemerintah pusat Dinas Koperasi dan UKM untuk mendorong UKM dalam meghadapi pandemi yaitu berupa Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dimana bantuan tersebut diberikan kepada pelaku UKM sebesar 2,4 juta untuk setiap pelaku UKM. Bantuan tersebut sangat berguna bagi pelaku UKM, kerena bantuan tersebut pelaku UKM yang tutup bisa bangkit dan memulihkan usahanya. Ibu Nuzaryanti berharap dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UKM dapat memberikan peningkatan ekonomi dan dapat menciptakan inovasi-inovasi baru.

Berdasarkan fenomena tersebut, UKM di Kota Langsa sebagai objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui **“Pengaruh Literasi Keuangan, Tingkat Pendidikan, Bantuan Pemerintah, dan Perencanaan Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan UKM di Kota Langsa”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah literasi keuangan, tingkat pendidikan, bantuan pemerintah, dan perencanaan keuangan berpengaruh secara parsial terhadap perilaku keuangan UKM di Kota Langsa?
2. Apakah literasi keuangan, tingkat pendidikan, bantuan pemerintah, dan perencanaan keuangan berpengaruh secara simultan terhadap perilaku keuangan UKM di Kota Langsa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan, tingkat pendidikan, bantuan pemerintah, dan perencanaan keuangan secara parsial terhadap perilaku keuangan UKM di Kota Langsa.
2. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan, tingkat pendidikan, bantuan pemerintah, dan perencanaan keuangan secara simultan terhadap perilaku keuangan UKM di Kota Langsa.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak diantaranya bagi pemerintah dan akademis sebagai bahan pertimbangan dan pengetahuan mengenai variabel yang mempengaruhi perilaku keuangan UKM sehingga dapat memberi wawasan untuk berkembangnya UKM dalam objek penelitian.

1. Bagi Pemerintah, untuk memberikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan mengenai UKM, memperoleh solusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi UKM di Kota Langsa, menerima masukan dalam meningkatkan kulitas pelaksanaan UKM agar lebih berkembang dari segi keseluruhan mulai dari produksi hingga pemasaran terutama masalah keuangan.
2. Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM), untuk menambah wawasan mengenai perilaku keuangan yang baik sehingga dapat sebagai dasar pengembangan usaha. Mengetahui seberapa penting literasi keuangan, tingkat pendidikan, dan perencanaan keuangan dalam mengelolah usaha sehingga tercipta usaha yang keuangannya baik.
3. Bagi Akademis, untuk menejelaskan ada tidaknya pengaruh literasi keuangan, tingkat pendidikan, bantuan pemerintah, dan perencanaan keuangan terhadap perilaku keuangan UKM di Kota Langsa, juga sebagai tambahan pengetahuan dan sumbangan bagi ilmu pengetahuan.